

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STBM PILAR 1  
(BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) PADA MASYARAKAT****Cut Juliana<sup>1</sup>, Syahril,<sup>2</sup> Salfani Oktaniara<sup>3</sup>**Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Meekkah<sup>1,2</sup>  
cut.juliana@serambimekkah.ac.id<sup>1</sup>, syahrill@gmail.com<sup>2</sup>**ABSTRACT**

*Stop Open Defecation Fee (ODF) is one of the activities in the Community Led Total Sanitation Program. The Community Led Total Sanitation (CLTS) is an approach to change hygienic and sanitary behavior through community empowerment by triggering. However, for the implementation of the program, out of 23 regencies/cities in Aceh Province, there is only one area that has implemented a Stop ODF, that is Banda Aceh City. Meanwhile, other areas still exhibit open defecation fee behavior, including Bener Meriah Regency. This study was carried out with the aim of knowing the relationship between knowledge, family income, the role of health workers and ownership of latrines with open defecation fee in the community in Nosar Tawar Jaya Village, Bener Kelipah District, Bener Meriah Regency. This study uses an analytical survey method with a cross sectional approach to 70 respondents. Then the data were analyzed using chi-square statistics. The results of the bivariate analysis showed that from 70 respondents, it was found that there was a relationship between knowledge ( $P 0.000$ ), family income ( $P 0.004$ ), the role of health workers ( $P 0.004$ ) and latrine ownership ( $P 0.000$ ) with open defecation fee. The suggestion is, it is hoped that the community will maintain personal, family, and environmental hygiene by stopping open defecation to prevent diseases caused by the environment. Furthermore, to the relevant agencies in order to carry out the maximum socialization related to the Community Led Total Sanitation Program.*

**Keywords** : *Open Defecation Fee, Knowledge, Family Income, role of health workers and latrine ownership, Community Led Total Sanitation.*

**ABSTRAK**

Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) merupakan salah satu kegiatan dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan suatu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Namun untuk pelaksanaan program itu, dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh hanya terdapat satu daerah saja yang sudah melaksanakan Stop Stop Buang Air Besar Sembarangan, yaitu Kota Banda Aceh. Sementara di daerah lainnya masih menunjukkan perilaku BABS, termasuk Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, pendapatan keluarga, peran petugas kesehatan dan kepemilikan jamban dengan buang air besar sembarangan pada masyarakat di Desa Nosar Tawar Jaya Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode *survei analitik* dengan pendekatan *cross sectional* pada 70 responden. Kemudian data itu dianalisis dengan menggunakan statistik *chi-square*. Hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa dari 70 responden, diperoleh bahwa ada hubungan antara pengetahuan ( $P 0,000$ ), pendapatan keluarga ( $P 0,004$ ), peran petugas kesehatan ( $P 0,004$ ) dan kepemilikan jamban ( $P 0,000$ ) dengan BABS. Sarannya, diharapkan pada masyarakat untuk menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan dengan stop BABS untuk mencegah penyakit akibat lingkungan. Selanjutnya kepada instansi terkait supaya melaksanakan sosialisasi secara maksimal terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

**Kata Kunci** : BABS, Pengetahuan, Pendapatan Keluarga, Peran Petugas Kesehatan dan Kepemilikan Jamban, STBM.

## PENDAHULUAN

Stop Buang Air Besar Sembarangan merupakan salah satu kegiatan dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM ini memiliki payung hukum yang kuat dalam pelaksanaannya, dimana program itu merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Dengan diundangkannya aturan itu, otomatis aturan yang lama sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dengan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentunya tidak berlaku lagi. STBM dalam Peraturan Menteri tersebut didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Strateginya meliputi : a) penciptaan lingkungan yang kondusif; b) peningkatan kebutuhan sanitasi; dan c) peningkatan penyediaan akses sanitasi. Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat agar dapat mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan BABS. (Odagiri, M. et al. 2017).

Sehubungan dengan BABS itu, apabila dirujuk pada data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2020, ditemukan bahwa jumlah Desa/ Kelurahan yang telah melaksanakan STBM adalah sudah mencapai 61.000 dari total 83.441 Desa/ Kelurahan di Indonesia. Kemudian apabila dipersentasekan, diketahui bahwa Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2020 meningkat 73,1% dari capaian tahun 2019 sebesar 69,4%. (Kementerian Kesehatan RI : 2021). Selanjutnya data tersebut melampirkan juga bahwa ada 4 (empat) Provinsi yang telah mencapai 100% Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM, yaitu : DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan. Sementara Provinsi dengan persentase terendah yang melaksanakan

STBM yang terdiri atas Propinsi Papua (17,9%), Papua Barat (22,4%) dan Maluku (32,2%). Selain itu, ada tiga Provinsi dengan realisasi Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi yaitu : Jawa Tengah (8.523), Jawa Timur (7.797) dan Jawa Barat (4.246). (Kementerian Kesehatan RI : 2021).

Khusus untuk Propinsi Aceh, secara nasional persentase Desa/ Kelurahan yang telah melaksanakan STBM pada tahun 2020 adalah sebesar 53,1%. (Kementerian Kesehatan RI : 2021). Persentase demikian menempatkan Propinsi Aceh tidak jauh berbeda dengan Propinsi Maluku Utara (46,9%), Kalimantan Utara (43,8%), Maluku (32,2%), Papua Barat (22,4) dan Papua (17,9%) yang berada pada posisi paling bawah dalam klasemen STBM yang disusun oleh Kementerian Kesehatan RI. Sementara apabila dirujuk profil Kesehatan Aceh tahun 2019, didapatkan bahwa Desa/ Kelurahan yang sudah melaksanakan STBM adalah sebanyak 3.428 Desa/ Kelurahan atau 53% dari total 6.514 Desa/ Kelurahan yang tersebar diberbagai Kabupaten/Kota. (Dinas Kesehatan Aceh : 2019). Dengan demikian, berdasarkan profil kesehatan itu sudah memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan serius dalam pengelolaan sanitasi masyarakat di Indonesia, khususnya di Propinsi Aceh. Padahal harus diakui bahwa persoalan sanitasi itu merupakan elemen penting dalam menunjang derajat kesehatan manusia. Namun apabila ada permasalahan dalam sanitasi itu, tentunya akan berdampak negatif pada aspek kehidupan.

Sehubungan dengan persoalan sanitasi itu, pengelolaan tinja adalah salah satu persoalan yang patut dicermati dengan serius. Secara teoritik, ada hubungan yang erat antara tinja dan kesehatan, terutama gangguan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit yang berbasis saluran cerna. Gangguan itu disebabkan oleh faktor masih kurangnya fasilitas penyediaan air bersih,

hygiene sanitasi dan perilaku hidup sehat. Karena itu, gangguan tinja terhadap lingkungan itu tidak hanya mencakup nilai estetika saja melainkan juga terjadi bau yang merangsang bersarangnya vector lalat yang dapat menularkan penyakit karena feses juga berperan sebagai sumber penyakit (Didik Sarudji, 2012).

Diantara penyakit yang mungkin timbul akibat penularan vector yang diakibatkan oleh tinja itu adalah penyakit diare. Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Propinsi Aceh. Apabila kita jadikan Kabupaten Bener Meriah di Propinsi Aceh sebagai salah satu objek lokasi penelitian, pada tahun 2020 saja di daerah itu ditemukan kasus diare untuk semua umur mencapai 4.073 kasus, dimana untuk kasus balita mencapai 2.861 kasus dari jumlah 150.849 penduduk. Diantara kasus tersebut, terdapat 3 (tiga) kasus kematian *post neonatal* (29 hari-11 bulan akibat diare). Dengan demikian, dapat didalilkan bahwa cakupan penanganan diare pada daerah tersebut belumlah maksimal, dimana masih banyak terjadinya kasus diare yang belum mendapat pelayanan yang memadai. Diantara salah satu penyebabnya adalah perilaku hidup yang belum baik. (Dinas Kesehatan Bener Meriah, 2020). Atas dasar dalil demikian, tentunya dapat diduga bahwa banyak juga daerah lainnya di Propinsi Aceh yang masih belum melaksanakan STBM, termasuk Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan hal demikian itu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan memilih salah satu Desa di Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh. Alasannya, apabila dirujuk pada data Dinas Kesehatan Bener Meriah tahun 2020 disebutkan bahwa dari 233 Desa yang berada di Kabupaten Bener Meriah, hanya terdapat 107 Desa (45,9%) saja yang melaksanakan STBM dan hanya 2 (dua) Desa yang sudah STBM. Sementara secara kumulatif, Desa dengan SBS (Stop Buang Air Besar

Sembarangan) atau ODF (*Open Defecation Free*) yang sudah terverifikasi mencapai 63 desa atau 27%. (Dinas Kesehatan Bener Meriah, 2020). Banyaknya Desa yang belum melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan itu dilandasi oleh berbagai faktor. Diantaranya didapatkan dari hasil wawancara dan observasi untuk memperoleh data awal diperoleh informasi bahwa kebiasaan buang air besar sembarangan merupakan perilaku masyarakat yang dianggap benar di wilayah tersebut sejak dahulu dikarenakan masyarakat tidak tau efek buruknya tidak memiliki jamban yang layak.

Selain itu, masih ada juga masyarakat yang menggunakan air parit dan sungai sebagai *septic tank* atau “tempat pembuangan akhir”. Kemudian ditemukan juga bahwa masih masyarakat yang masih buang air besar di sungai meskipun sudah memiliki jamban. Selanjutnya faktor kondisi rumah yang tidak memiliki sarana jamban keluarga juga menjadi persoalan tersendiri. Apalagi kondisi sarana jamban umum tidak terpelihara dengan baik dan ditambah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Akhirnya, penggunaan parit dan sungai sebagai “*septic tank*” menjadi doktrin bagi masyarakat karena dianggap tidak akan berpengaruh terhadap gangguan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan STBM Pilar 1 (Buang Air Besar Sembarangan) pada masyarakat di Desa Nosar Tawar Jaya Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode *survei analitik* dengan pendekatan studi *cross sectional*, yakni pengukuran variabel dependen dan variabel indenpenden yang dilakukan hanya satu kali pada waktu yang bersamaan dengan lokasi penelitian di Desa Nosar Tawar Jaya Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 08-12 November 2021. Selanjutnya populasi dalam penelitian ini adalah semua Kepala Keluarga (KK) yang berada di Desa Nosar Tawar Jaya yang berjumlah 70 Kepala Keluarga (KK). Sementara teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *total sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dan diuji dengan menggunakan uji *chi square* ( $X^2$ ) melalui bantuan aplikasi SPSS versi 22,0.

## HASIL

### Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 1), diketahui bahwa karakteristik responden sebagian besar responden berumur dalam kisaran 20-35 tahun atau sebanyak 55,7%. Kemudian untuk sebagian responden adalah berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 52,9%. Selanjutnya sebagian besar jumlah anggota keluarga < 5 adalah 57,1 %. Sementara sebagian besar responden bekerja sebagai Petani/ Nelayan yakni 51,4%. Terakhir, sebagian besar responden itu telah berpendidikan tamat SMA, yakni sebesar 60%.

**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik responden**

Variabel	f	%
<b>Umur</b>		
< 20 tahun	2	2,9
20-35 tahun	39	55,7
>35 tahun	29	41,4
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	37	52,9
Perempuan	33	47,1
<b>Jumlah Anggota Keluarga</b>		
< 5 orang	40	57,1
>5 orang	30	42,9
<b>Pekerjaan</b>		
PNS	15	21,5
Swasta	19	27,1
Petani/Nelayan	36	51,4
<b>Pendidikan</b>		
Tidak Tamat SD	3	4,3
Tamat SD	2	2,9

Tamat SMP	11	15,7
Tamat SMA	42	60,0
Tamat Perguruan Tinggi	12	17,1

### Analisis Univariat

Berdasarkan hasil analisis univariat (Tabel 2) diketahui bahwa dari 70 responden, sebagian besar responden adalah BABS (51,4%). Kemudian sebagian besar responden berpendidikan rendah (54,3%) dan sebagian besar responden berpendapatan tidak sesuai UMP (77,1%). Kemudian sebagian besar responden menyatakan peran petugas kesehatan masih kurang (54,3%) dan sebagian besar responden tidak memiliki jamban sendiri (47,1%).

**Tabel 2. Hasil Analisis Univariat Analisis**

Variabel	f	%
<b>Buang Air Besar Sembarangan (BABS)</b>		
BABS	36	51,4
Tidak BABS	34	48,6
Total	70	100
<b>Pengetahuan</b>		
Baik	32	45,7
Kurang	38	54,3
Total	70	100
<b>Pendapatan keluarga</b>		
UMP	16	22,9
< UMP	54	77,1
Total	70	100
<b>Peran petugas kesehatan</b>		
Tinggi	32	45,7
Rendah	38	54,3
Total	70	100
<b>Kepemilikan Jamban</b>		
Ya	33	47,1
Tidak	37	52,9
Total	70	100

### Analisis Bivariat

Berdasarkan hasil analisis bivariat (Tabel 3) pada variabel pengetahuan dengan BABS, diketahui bahwa proporsi responden yang BABS lebih besar dari pada responden yang memiliki pengetahuan rendah (81,6%) dan dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan tinggi (15,6%). Kemudian pada variabel pendapatan

keluarga dengan BABS, diketahui bahwa proporsi responden yang BABS itu lebih besar dari pada responden yang pendapatan keluarga < UMP (61,1%) dan dibandingkan dengan responden yang pendapatan keluarga sesuai dengan UMP (18,8%). Selanjutnya variabel peran petugas Kesehatan dengan BABS, diketahui bahwa proporsi responden yang BABS lebih besar dari pada kurangnya peran petugas Kesehatan (68,4%) dibandingkan dengan responden yang peran petugas kesehatan yang baik (31,3%). Sementara variabel kepemilikan jamban dengan BABS, diketahui bahwa proporsi responden yang

BABS lebih besar pada responden yang tidak memiliki jamban (83,8%) dibandingkan dengan responden yang memiliki jamban (15,2%). Kemudian berdasarkan hasil uji *Chi-Square* dinyatakan ada hubungan yang signifikan pada variabel pengetahuan rendah ( $p = 0,000$ ), pendapatan keluarga < UMP ( $p = 0,004$ ), peran petugas Kesehatan kurang ( $p = 0,004$ ), dan tidak memiliki jamban ( $p = 0,000$ ) dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada masyarakat di Desa Nosar Tawar Jaya Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021.

Tabel 3. Hasil Analisis Bivariat

Variabel	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)				Total		p- value
	Ya		Tidak		N	%	
	n	%	n	%			
<b>Pengetahuan</b>							
Tinggi	5	15,6	27	84,4	32	100	0,000
Rendah	31	81,6	7	18,4	38	100	
<b>Total</b>	<b>36</b>		<b>34</b>		<b>70</b>	<b>100</b>	
<b>Pendapatan Keluarga</b>							
UMP	3	18,8	13	81,3	16	100	0,004
Tidak UMP	33	61,1	21	38,9	54	100	
<b>Total</b>	<b>36</b>		<b>34</b>		<b>70</b>	<b>100</b>	
<b>Peran Petugas Kesehatan</b>							
Baik	10	31,3	22	68,8	32	100	0,004
Kurang	26	68,4	12	31,6	38	100	
<b>Total</b>	<b>36</b>		<b>34</b>		<b>70</b>	<b>100</b>	
<b>Kepemilikan Jamban</b>							
Memiliki	5	15,2	28	84,8	33	100	0,000
Tidak Memiliki	31	83,8	6	16,2	37	100	
<b>Total</b>	<b>36</b>		<b>34</b>		<b>70</b>	<b>100</b>	

## PEMBAHASAN

### Hubungan Pengetahuan dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan ( $p = 0,000$ ) antara hubungan pengetahuan dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), menunjukkan hubungan yang positif artinya semakin tinggi pengetahuan seseorang semakin tidak buang air besar sembarangan, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai proporsi responden yang buang air

besar sembarangan lebih besar pada responden dengan pengetahuan rendah dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukma dkk bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan status ODF ( $p = 0,029$ ) (Sukma dkk : 2018). Kemudian sejalan juga dengan penelitian Putri, dkk, dengan hasil *P Value* = (0,000) menyatakan bahwa ada hubungan pengetahuan dengan status BABS (Putri, dkk, 2021).

Berkaitan dengan hal tersebut itu, jika

dilihat dari karakteristik pendidikan responden dalam penelitian ini sebagian besar tamat SMA (60%), ini akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh pendidikan formal, antara pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi, orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya (Wawan dan Dewi, 2014). Notoatmodjo menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu dimana hal tersebut terjadi ketika seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan diperoleh secara sadar melalui pancaindra manusia, dimana sebagian besar diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*ovent behavior*) (Notoatmodjo, 2014).

Seperti halnya tindakan buang air besar sembarangan (BABS), ketika seseorang secara sadar mengetahui tentang akibat atau dampak buruk atas tindakan buang air besar sembarangan terhadap kesehatan, tentunya akan berupaya untuk melakukan perubahan perilakunya, sehingga sangat diperlukan pendidikan ataupun pengetahuan terkait dengan kesehatan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan STMB pilar 1 yakni BABS diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ahmad Kholid bahwa pengetahuan diperlukan sebagai dorongan psikis dalam menumbuhkan sikap dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimulasi terhadap tindakan seseorang (Ahmad Kholid, 2018).

Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan didapatkan bahwa responden masih ada yang belum mengetahui jamban keluarga yang dianjurkan dalam kesehatan atau jamban sehat seperti lantainya kedap air, tidak memiliki atap, tidak memiliki dinding yang kuat, lantai jamban kedap air dan tidak licin dan memiliki SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) dan juga berapa jarak *septic tank* dengan sumber air di

rumah. Kemudian masih ada juga rumah yang berada di Desa Nosar Tawar Jaya, jamban yang tidak sesuai atau menggunakan corong air yang semen sebagai tempat atau WC pengganti WC leher angsa. Selanjutnya masih ada juga masyarakat tidak tahu bahwa buang air besar sembarangan (BABS) dapat mencemari lingkungan dengan beralasan, jika buang air di tanah atau mengkorek lobang tidak mencemari lingkungan karena menurut responden tinja tersebut langsung ditutup dengan tanah dan akan menyuburkan tanah mereka sebagai pengganti pupuk untuk digunakan pada tanaman.

### **Hubungan Pendapatan keluarga dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)**

Hasil analisis uji *Chi-Square* (Tabel 2) menunjukkan hubungan yang signifikan ( $p= 0,004$ ) antara pendapatan keluarga dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan arah hubungan yang positif. Artinya, semakin tinggi tingkat pendapatan keluarga, maka makin banyak responden tidak BABS, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warlenda, dkk bahwa terdapat hubungan pendapatan dengan BABS ( $p = 0,005$ ) (Warlenda dkk : 2020). Sama halnya juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitry dan Agustin yang menyatakan ada hubungan pendapatan keluarga dengan kepemilikan jamban dengan  $p\ value = (0,001)$  (Novitry Fera dan Agustin Rizki, 2017).

Kemudian tingkat pendapatan keluarga itu juga berkaitan erat dengan jenis pekerjaan kepala keluarga, dimana jenis pekerjaan yang baik akan memperoleh pendapatan yang baik pula. Jonneri Masli dkk dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat pendapatan berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengadaan jamban keluarga, yaitu pendapatan diatas rata-rata atau dibawah rata-rata akan cenderung mempengaruhi partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil statistik disebutkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pendapatan dengan

tingkat partisipasi masyarakat dalam pengadaan jamban keluarga (Jonneri Masli dkk, 2010). Selain itu, Hayana, dkk menyebutkan bahwa tingkat pendapatan keluarga itu akan berpengaruh terhadap pembangunan jamban di masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian keluarga dalam pembangunan jamban dengan melihat hal tersebut, maka upaya peningkatan pendapatan keluarga secara nyata akan memberikan hasil yang baik dalam peningkatan penggunaan jamban. (Hayana dkk, 2018).

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa responden yang memiliki pendapatan keluarga tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau dibawah Rp. 3.165.031. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Nosar Tawar Jaya dengan pendapatan yang rendah masih berperilaku BABS. Tingkat pendapatan rendah pada masyarakat Desa Nosar Tawar Jaya disebabkan sebagian besar pekerjaan yaitu petani atau berkebun. Masyarakat hanya bertani pada musim kemarau karena pada musim hujan sering banjir yang menghanyutkan tanaman sayur. Pendapatan yang ada cuma hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap perilaku BABS yang dikaitkan dengan penggunaan jamban yang tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, seperti jamban. Dalam pembangunan jamban sangat berkaitan erat dengan tingkat pendapatan seseorang, dikarenakan dalam pembangunan jamban sehat membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

### **Hubungan Peran Petugas Kesehatan dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan ( $p = 0,004$ ) antara peran petugas kesehatan dengan BABS. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan

Sudiadnyana (2021) yang berjudul hubungan tingkat pengetahuan dan peran petugas kesehatan dengan perilaku BABS Di Desa Kalianget Seririt Buleleng, dengan hasil  $p\ value = (0,000)$  yang menyatakan bahwa ada hubungan petugas kesehatan dengan perilaku BABS. Sama halnya juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2018) yang berjudul *Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* faktor yang mendorong perilaku penggunaan jamban di Kabupaten Bondowoso dengan hasil  $p\ value = (0,030)$  menyatakan ada hubungan peran dari petugas kesehatan dengan faktor yang mendorong perilaku penggunaan jamban (Wulandari dkk, 2019). Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayana dkk (2018) menunjukkan hasil yang berbeda dimana hasil penelitiannya menyatakan tidak ada hubungan ( $p = 0,103$ ) antara petugas kesehatan terhadap perilaku BABS di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Uraian di atas itu sesuai dengan hasil di lapangan bahwa, petugas kesehatan pernah melakukan penyuluhan mengenai pemanfaatan jamban tetapi hanya berapa kali saja semenjak satu tahun ini. Kemudian ada juga masyarakat yang menyatakan bahwa pada saat penyuluhan tentang perilaku buang air besar sembarangan (BABS), masyarakat tidak dapat hadir dikarenakan waktu yang kurang tepat untuk berjumpa karena masyarakat pada saat itu tidak di lingkungan rumah dikarenakan pergi bekerja ke kebun atau ke gunung. Sehubungan dengan hal ini, Notoatmodjo (2014) menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan di tataran lapangan merupakan ujung tombak pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan harus efektif dan efisien.

Selain itu, pelayanan kesehatan juga harus mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan, klien dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan terhadap masalah BABS pada masyarakat, maka peran petugas kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran

melalui penyuluhan yang berkaitan dengan STMB khususnya Pilar 1 dengan harapan terjadinya perubahan perilaku BABS pada masyarakat.

### **Hubungan Kepemilikan Jamban dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan ( $p = 0,000$ ) antara kepemilikan jamban dengan BABS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia dkk (2021) berjudul perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, dengan hasil  $p$  value = (0,001) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kepemilikan jamban dengan perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Hasil penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Paladiang dkk (2020) berjudul determinan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di Desa Kiritana Kecamatan Kampera dengan hasil  $p$  value = (0,000) menyatakan bahwa ada hubungan kepemilikan jamban dengan perilaku buang air besar sembarangan (BABS).

Berbicara tentang kepemilikan jamban, tentunya tidak terlepas dari status ekonomi dan sosial budaya. Status ekonomi tentunya berpengaruh pada tingkat pendapatan seseorang dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dimana jika tingkat pendapatan yang tinggi akan berpengaruh pada fasilitas yang diperoleh. Apabila tingkat pendapatan tinggi, maka fasilitas kesehatan mereka khususnya didalam rumah akan terjamin, misalnya dalam penyediaan jamban keluarga, begitu pula sebaliknya rendahnya pendapatan merupakan rintangan bagi kalangan yang kurang mampu dalam memenuhi fasilitas kesehatan sesuai kebutuhannya.

Konsekuensi dari masih kurangnya kepemilikan jamban oleh masyarakat dapat menimbulkan berbagai dampak yang buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri, dimana apabila masyarakat masih berperilaku buang air besar tidak pada jamban atau feses dibuang langsung ke

sungai atau kebun, tentunya dapat merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan berdampak buruk pada kesehatan, salah satunya terjadinya gangguan kesehatan seperti diare. (Mukhlisin dan Solihudin, 2020).

Dari sisi sosial budaya, persoalan BABS ini sangat berhubungan dengan kebiasaan masyarakat, dimana masih ada keluarga yang sudah memiliki jamban pribadi namun tetap BABS. Hal ini terjadi karena ada anggota keluarga BAB saat berkebun sedangkan di kebun tidak terdapat jamban. Sementara dari hasil observasi responden menyatakan bahwa kepemilikan jamban di Desa Nosar Tawar Jaya masih kurang dikarenakan faktor ekonomi. Sebagian besar responden yang tidak memiliki jamban menyebabkan perilaku BABS. Kepemilikan jamban sangat mempengaruhi penggunaan jamban oleh suatu keluarga. Perilaku BABS sangat tergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia seperti jamban. Kepemilikan jamban sehat dengan perilaku BABS erat kaitannya. Beberapa keluarga belum bisa membangun jamban karena pendapatan hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari.

### **KESIMPULAN**

Ada hubungan antara pengetahuan, pendapatan keluarga, peran petugas kesehatan dan kepemilikan jamban dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada masyarakat di Desa Nosar Tawar Jaya Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, termasuk kepada kepala Desa Nosar Tawar Jaya dan masyarakatnya yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A., Nurjazuli., dan Darundiati, Y. H. (2021). Perilaku Buang air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 9 (2). Pp. 166-175.
- Dinas Kesehatan Aceh. (2020). *Profil Kesehatan Aceh 2019*. Aceh: Dinas Kesehatan Aceh.
- Dinas Kesehatan Bener Meriah. 2020. *Profil Kesehatan Bener Meriah 2019*. <https://dinkes.benermeriahkab.go.id>
- Hayana., Marlina, H dan Kurnia, A. (2018). Hubungan Karakteristik Individu dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Buang Air Besar Sembarangan. *Jurnal Kesetahan Komunitas*. 4 (1). Pp.8-15.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021), *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kholid, A. (2018). *Promosi Kesehatan*. Ed. 1. Cet. 5. Depok: Rajawali Pers.
- Masli, J., Suwarni, A., dan Suharman. (2010). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Jamban Keluarga Melalui Community Lead Total Sanitation. *Berita Kedokteran Masyarakat*. 26 (2). pp. 144-151
- Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novitry, F dan Agustin, R. (2017). Determinan Kepemilikan Jamban Sehat di Desa Sukolmulyo Martapura Pelambang. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. 2 (2). pp.107-116.
- Odagiri, M., Muhammad, Z., Cronin, A. A., Gnilo, M. E., Mardikanto, A. K., Umam, K., dan Asamou, Y. T. (2017). Enabling Factors for Sustaining Open Defecation-Free Communities in Rural Indonesia : A Cross-Sectional Study, *International Journal of Environmental Research and Public*. 14 (12). pp.1-20.
- Paladiang, E., Haryanto, J., dan Mar'ah Has., E. M. (2020). Determinan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan di desa Kiritana Kecamatan Kampera. *Indonesia Journal of Community Health Nursing*. 5 (1). Pp. 33-40.
- Putri, A. W. K., Notes, N. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Status Bebas Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. 11 (2). pp. 90-98.
- Sari, K. N. P. dan Suduadnyana, I. W. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Peran Petugas Kesehatan dengan Perilaku BABS di Desa Kalianget seririt Buleleng. *Jurnal Kesehatan Lingkungan* .11 (2). Pp. 159-164.
- Sarudji D. (2012). *Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Media Ilmu.
- Sukma, H., Mursid., Nurjazuli. (2018). Hubungan Pengetahuan, Sikap BAB dan Kepemilikan Septic Tank dengan Status ODF (Open Defecation Free) di Kecamatan Candisari Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 6 (2). pp.143-149.
- Warlenda, S. V., Radifa, R. A. D., Sari, N. P., Wahyudi, A. (2020). Hubungan Sanitasi Dasar, Pengetahuan, Perilaku dan Pendapat Terhadap Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan di Kelurahan Laksamana Wilayah Kerja Puskesmas Dumai Kota Tahun 2020. *Jurnal Photon*. 11 (2). pp. 120-136.
- Wawan dan dewi. (2014). *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wulandari., Soesety, F. A., dan Novi, A. C. (2019). Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) Faktor yang Mendorong Perilaku Penggunaan Jamban di Kabupaten Bondowoso tahun 2018. *Multidisciplinary journal*. 2 (1). Pp. 1-3.